



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN  
Nomor SE-**23**/PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG  
BERSUMBER DARI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
PENDAPATAN HAK DAN PERIJINAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN RI TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI nomor B.750/SJ/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 hal Usulan Maksimal Pencairan (MP) Penerimaan PNBP Atas Pendapatan Hak dan Perizinan Tahun 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA (PNBP) pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI;
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA (PNBP) Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI.

D. Dasar .....

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.02/2011 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Pendapatan Hak dan Perijinan pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahap I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp286.271.961.447,- (Dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
2. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian.....

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2018



Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPB
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB
8. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Yth.

1. Kepala KPPN Banda Aceh
2. Kepala KPPN Padang Sidempuan
3. Kepala KPPN Gunung Sitoli
4. Kepala KPPN Pekanbaru
5. Kepala KPPN Padang
6. Kepala KPPN Bukittinggi
7. Kepala KPPN Jambi
8. Kepala KPPN Palembang
9. Kepala KPPN Pangkal Pinang
10. Kepala KPPN Bengkulu
11. Kepala KPPN Purwakarta
12. Kepala KPPN Bandung I
13. Kepala KPPN Cirebon
14. Kepala KPPN Tasikmalaya
15. Kepala KPPN Semarang I
16. Kepala KPPN Purworejo
17. Kepala KPPN Surakarta
18. Kepala KPPN Purwokerto
19. Kepala KPPN Malang
20. Kepala KPPN Kediri
21. Kepala KPPN Bondowoso
22. Kepala KPPN Pamekasan
23. Kepala KPPN Mataram
24. Kepala KPPN Kupang
25. Kepala KPPN Ende
26. Kepala KPPN Sampit
27. Kepala KPPN Balikpapan
28. Kepala KPPN Manado
29. Kepala KPPN Gorontalo
30. Kepala KPPN Palu
31. Kepala KPPN Poso
32. Kepala KPPN Makassar I
33. Kepala KPPN Watampone
34. Kepala KPPN Bantaeng
35. Kepala KPPN Pare Pare
36. Kepala KPPN Palopo
37. Kepala KPPN Majene
38. Kepala KPPN Kendari
39. Kepala KPPN Ambon
40. Kepala KPPN Ternate
41. Kepala KPPN Jayapura
42. Kepala KPPN Sorong
43. Kepala KPPN Lubuk Linggau
44. Kepala KPPN Tapaktuan
45. Kepala KPPN Rantau Prapat
46. Kepala KPPN Tanjung Balai Asahan
47. Kepala KPPN Tahuna
48. Kepala KPPN Tual
49. Kepala KPPN Lhokseumawe
50. Kepala KPPN Solok
51. Kepala KPPN Rengat
52. Kepala KPPN Singkawang
53. Kepala KPPN Ketapang
54. Kepala KPPN Garut
55. Kepala KPPN Pati
56. Kepala KPPN Mojokerto
57. Kepala KPPN Bau-Bau
58. Kepala KPPN Saumlaki
59. Kepala KPPN Sibolga
60. Kepala KPPN Tanjung Pandan
61. Kepala KPPN Baturaja
62. Kepala KPPN Ruteng
63. Kepala KPPN Tobelo
64. Kepala KPPN Magelang
65. Kepala KPPN Kotabumi
66. Kepala KPPN Putussibau
67. Kepala KPPN Sidikalang
68. Kepala KPPN Manna
69. Kepala KPPN Medan II
70. Kepala KPPN Balige
71. Kepala KPPN Tangerang
72. Kepala KPPN Sukabumi
73. Kepala KPPN Kudus
74. Kepala KPPN Cilacap
75. Kepala KPPN Batam
76. Kepala KPPN Lahat
77. Kepala KPPN Liwa
78. Kepala KPPN Kuningan
79. Kepala KPPN Klaten
80. Kepala KPPN Wonosari
81. Kepala KPPN Nunukan
82. Kepala KPPN Amlapura
83. Kepala KPPN Benteng
84. Kepala KPPN Kolaka
85. Kepala KPPN Raha
86. Kepala KPPN Rangkasbitung
87. Kepala KPPN Sragen
88. Kepala KPPN Purwodadi
89. Kepala KPPN Sidoarjo
90. Kepala KPPN Sanggau
91. Kepala KPPN Selong
92. Kepala KPPN Makale
93. Kepala KPPN Atambua
94. Kepala KPPN Masohi
95. Kepala KPPN Sinjai
96. Kepala KPPN Mamuju
97. Kepala KPPN Marisa
98. Kepala KPPN Mukomuko
99. Kepala KPPN Jakarta VII

## LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor SE- 23 /PB/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA yang Bersumber Dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Hak dan Perijinan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahap I Tahun Anggaran 2018

**DAFTAR ALOKASI MAKSIMAL PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/NAAMA UNIT/PROVINSI/SATKER	PAGU DIPA (PNBP)	MP I
1	2	3	4	5	6	7
<b>DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA</b>						
<b>PUSAT</b>						
A						
1	182	Jakarta VII	451139	SEKRETARIAT DITJEN BINAPENTA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	13.688.100.000	13.688.100.000
2	182	Jakarta VII	451145	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR KERJA	7.000.000.000	7.000.000.000
3	182	Jakarta VII	451151	DIREKTORAT PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	8.000.000.000	8.000.000.000
4	182	Jakarta VII	451160	DIREKTORAT PENGGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	4.000.000.000	4.000.000.000
5	182	Jakarta VII	451182	DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	100.000.000.000	97.411.361.447
6	182	Jakarta VII	500638	DIREKTORAT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	19.000.000.000	19.000.000.000
7	022	Bandung I	259322	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	47.000.000.000	47.000.000.000
B						
<b>DAERAH</b>						
<b>JAWA BARAT</b>						
8	147	Kuningan	029450	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUNINGAN	1.151.000.000	1.151.000.000
9	022	Bandung I	021273	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT	823.000.000	823.000.000
10	096	Garut	029417	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT	198.000.000	198.000.000
11	147	Kuningan	029470	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MAJALENGKA	1.052.000.000	1.052.000.000
12	025	Tasikmalaya	029432	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA	362.000.000	362.000.000
13	128	Sukabumi	029366	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SUKABUMI	362.000.000	362.000.000
14	021	Purwakarta	029386	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB PURWAKARTA	1.151.000.000	1.151.000.000
15	025	Tasikmalaya	029514	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJAR	823.000.000	823.000.000
16	021	Purwakarta	029394	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG	823.000.000	823.000.000
17	024	Cirebon	029496	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA CIREBON	659.000.000	659.000.000
18	025	Tasikmalaya	022210	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, DAN TRANSIMIGRASI KABUPATEN PANGANDARAN	495.000.000	495.000.000
<b>JAWA TENGAH</b>						
19	129	Kudus	039449	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK	560.000.000	560.000.000
20	097	Pati	039511	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI KABUPATEN REMBANG	495.000.000	495.000.000
21	162	Sragen	039629	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARANGANYAR	823.000.000	823.000.000
22	130	Cilacap	031655	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CILACAP	560.000.000	560.000.000
23	027	Purworejo	039596	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN	362.000.000	362.000.000

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/NAMA UNIT/PROVINSI/SATKER	PAGU DIPA (PNBP)	MP1
1	2	3	4	5	6	7
24	029	Purwokerto	039328	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS	198.000.000	198.000.000
25	148	Klaten	039601	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN	690.000.000	690.000.000
26	026	Semarang I	039441	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL	396.000.000	396.000.000
27	129	Kudus	03505	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB JEPARA	495.000.000	495.000.000
28	026	Semarang I	039434	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SEMARANG	297.000.000	297.000.000
29	028	Surakarta	039635	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI	198.000.000	198.000.000
30	148	Klaten	039606	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB BOYOLALI	823.000.000	823.000.000
31	162	Sragen	039618	DINAS NAKERTRANS KABUPATEN SRAGEN	198.000.000	198.000.000
32	115	Magetan	039560	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAGELANG	526.000.000	526.000.000
33	163	Purwodadi	039517	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB BLORA	526.000.000	526.000.000
					<b>560.000.000</b>	<b>560.000.000</b>
34	149	Wonosari	049160	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	560.000.000	560.000.000
					<b>5.167.000.000</b>	<b>5.167.000.000</b>
				<b>JAWA TIMUR</b>		
35	035	Bondowoso	059507	DINAS NAKERTRANS KABUPATEN BONDOWOSO	1.151.000.000	1.151.000.000
36	036	Pamekasan	059492	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP	656.000.000	656.000.000
37	032	Malang	059502	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU	461.000.000	461.000.000
38	034	Kediri	059592	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN TRENGGALEK	362.000.000	362.000.000
39	098	Mojokerto	059476	DINAS TENAGA KERJA KAB. JOMBANG	297.000.000	297.000.000
40	165	Sidoarjo	059467	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO	560.000.000	560.000.000
41	035	Bondowoso	059554	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO	560.000.000	560.000.000
42	032	Malang	059542	DISNAKER DAN TRANSMIGRASI KAB MALANG	823.000.000	823.000.000
43	034	Kediri	059582	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NGANIUK	297.000.000	297.000.000
				<b>BANTEN</b>	<b>396.000.000</b>	<b>396.000.000</b>
44	161	Rangkasbitung	290359	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KAB LEBAK	198.000.000	198.000.000
45	127	Tangerang	299503	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG SELATAN	198.000.000	198.000.000
				<b>ACEH</b>	<b>2.370.000.000</b>	<b>2.370.000.000</b>
46	089	Lhokseumawe	069337	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB BREUN	461.000.000	461.000.000
47	001	Banda Aceh	061814	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE JAYA	461.000.000	461.000.000
48	074	Tapaktuan	069333	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	297.000.000	297.000.000
49	074	Tapaktuan	065607	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SUBULUSSALAM	1.151.000.000	1.151.000.000

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/NAMA UNIT/PROVINSI/SATKER	PAGU DIPA (PNBP)	MP I
1	2	3	4	5	6	7
<b>SUMATERA UTARA</b>						
50	007	Gunung Sitoli	072709	DINAS PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN, DAN KOPERASI KAB. NIAS BARAT	625.000.000	625.000.000
51	106	Sibolga	070445	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.TAPANULI TENGAH	427.000.000	427.000.000
52	076	Tanjung Balai Asahan	079404	DINAS TENAGA KERJA KAB ASAHAN	625.000.000	625.000.000
53	123	Medan II	079357	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB LANGKAT	362.000.000	362.000.000
54	119	Sidikalang	070746	DINA KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DAIRI	362.000.000	362.000.000
55	106	Sibolga	079499	DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA	526.000.000	526.000.000
56	123	Medan II	079489	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI	625.000.000	625.000.000
57	006	Padang Sidempuan	072212	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PADANG LAWAS	297.000.000	297.000.000
58	006	Padang Sidempuan	079468	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	297.000.000	297.000.000
59	075	Rantau Prapat	079381	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LABUHAN BATU	297.000.000	297.000.000
60	075	Rantau Prapat	072409	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	396.000.000	396.000.000
61	125	Balige	079416	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TOBA SAMOSIR	789.000.000	789.000.000
62	076	Tanjung Balai Asahan	072116	DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATU BARA	625.000.000	625.000.000
63	076	Tanjung Balai Asahan	079494	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANJUNG BALAI	297.000.000	297.000.000
<b>SUMATERA BARAT</b>						
64	010	Padang	089379	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PADANG	198.000.000	198.000.000
65	090	Solok	089341	DINAS SOSIAL DAN NAKERTRANS KAB SOLOK SELATAN	297.000.000	297.000.000
66	090	Solok	080449	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK	198.000.000	198.000.000
67	011	Bukittinggi	089316	DINAS TENAGA KERJA KAB TANAH DATAR	297.000.000	297.000.000
<b>JAMBI</b>						
68	012	Jambi	105159	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA JAMBI	1.052.000.000	1.052.000.000
<b>SUMATERA SELATAN</b>						
69	070	Lubuk Linggau	119092	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MUSI RAWAS	922.000.000	922.000.000
70	014	Palembang	119102	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR	396.000.000	396.000.000
71	144	Lahat	119300	DISNAKERTRANS KABUPATEN EMPAT LAWANG	560.000.000	560.000.000
72	070	Lubuk Linggau	111907	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	560.000.000	560.000.000
73	109	Baturaja	119291	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OKU SELATAN	560.000.000	560.000.000
<b>LAMPUNG</b>						
74	116	Kotabumi	129093	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MESUJI	922.000.000	922.000.000
75	145	Liwa	121310	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR BARAT	1.578.000.000	1.578.000.000

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/NAMA UNIT/PROVINSI/SATKER	PAGU DIPA (PNBP)	MP I
1	2	3	4	5	6	7
				<b>BENGKULU</b>	<b>4.279.000.000</b>	<b>4.279.000.000</b>
76	016	Bengkulu	269246	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BENGKULU TENGAH	724.000.000	724.000.000
77	016	Bengkulu	269255	DINAS TENAGA KERJA KOTA BENGKULU	823.000.000	823.000.000
78	181.	Mukomuko	269086	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MUKOMUKO	922.000.000	922.000.000
79	121.	Manna	269207	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU SELATAN	922.000.000	922.000.000
80	121.	Manna	269083	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KAUR	888.000.000	888.000.000
				<b>RIAU</b>	<b>1.844.000.000</b>	<b>1.844.000.000</b>
81	092	Rengat	091233	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB KUANTAN SINGINGI	198.000.000	198.000.000
82	092	Rengat	09469	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB INDRAGIRI HILIR	297.000.000	297.000.000
83	092	Rengat	09459	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB INDRAGIRI HULU	297.000.000	297.000.000
84	008	Pekanbaru	09483	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PELALAWAN	1.052.000.000	1.052.000.000
				<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>198.000.000</b>	<b>198.000.000</b>
85	137	Batam	329149	DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM	198.000.000	198.000.000
				<b>KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>362.000.000</b>	<b>362.000.000</b>
86	107	Tanjung Pandan	309152	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	263.000.000	263.000.000
87	015	Pangkal Pinang	300430	DINAS TENAGA KERJA KAB. BANGKA TENGAH	99.000.000	99.000.000
				<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>
88	044	Sampit	149264	DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN pariwisata KAB SERUYAN	99.000.000	99.000.000
				<b>KALIMANTAN UTARA</b>	<b>345.000.000</b>	<b>345.000.000</b>
89	152	Nunukan	169081	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB NUNUKAN	345.000.000	345.000.000
				<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>198.000.000</b>	<b>198.000.000</b>
90	047	Balikpapan	160252	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB PASER	198.000.000	198.000.000
				<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>1.120.000.000</b>
91	094	Ketapang	131109	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KAYONG UTARA	198.000.000	198.000.000
92	093	Singkawang	139082	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS	198.000.000	198.000.000
93	167	Sanggau	139316	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK	198.000.000	198.000.000
94	117	Putussibau	130557	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS Hulu	526.000.000	526.000.000

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/NAMA UNIT/PROVINSI/SATKER	PAGU DIPA (PNBP)	MPJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>SULAWESI UTARA</b>						
95	083	Tahuna	179245	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KEPULAUAN SANGIHE	198.000.000	198.000.000
96	049	Manado	179073	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MINAHASA SELATAN	568.500.000	568.500.000
97	049	Manado	179081	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MINAHASA TENAGGARA	297.000.000	297.000.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>						
98	052	Poso	181404	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA	913.500.000	913.500.000
99	052	Poso	189108	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TOJO UNA-UNA	198.000.000	198.000.000
100	051	Palu	189093	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. DONGGALA	642.000.000	642.000.000
101	051	Palu	189257	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PARIGI MOUTONG	297.000.000	297.000.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>						
102	057	Pare Pare	191734	DINAS SOSIAL,, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SIDENRENG RAPPANG	814.500.000	814.500.000
103	056	Bantaeng	199496	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN JENEPONTO	741.000.000	741.000.000
104	177	Sinjai	199455	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI	543.000.000	543.000.000
105	054	Makassar I	199096	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB TAKALAR	1.086.000.000	1.086.000.000
106	055	Watampone	199086	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO	814.500.000	814.500.000
107	058	Palopo	199090	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB LUWU	543.000.000	543.000.000
108	055	Watampone	199419	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BONE	715.500.000	715.500.000
109	054	Makassar I	199539	DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN PANGKAIENE DAN KEPULAUAN	913.500.000	913.500.000
110	056	Bantaeng	199480	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BANTAENG	543.000.000	543.000.000
111	155	Benteng	199505	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP , DAN TENAGA KERJA KAB. SELAYAR	198.000.000	198.000.000
112	055	Watampone	199548	DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SOPPENG	543.000.000	543.000.000
113	170	Makale	199089	DINAS KESEWAHTERAAN SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB TANATORAJA	543.000.000	543.000.000
114	057	Pare Pare	192132	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB ENREKANG	543.000.000	543.000.000
115	057	Pare Pare	199521	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BARU	543.000.000	543.000.000
116	057	Pare Pare	199595	DINAS TENAGA KERJA KOTA PARE PARE	396.000.000	396.000.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>						
117	103	Bau-Bau	205502	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUTON TENGAH	1.258.500.000	1.258.500.000
118	060	Kendari	209086	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE	1.332.000.000	1.332.000.000
119	060	Kendari	209088	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE UTARA	741.000.000	741.000.000
120	060	Kendari	209081	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KONAWE SELATAN	741.000.000	741.000.000
121	157	Raha	209070	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MUNA	741.000.000	741.000.000
122	060	Kendari	209082	DINAS NAKERTRANS DAN KESOS KAB BOMBANA	741.000.000	741.000.000
123	156	Kolaka	200826	DINAS TENAGA KERJA KAB KOLAKA UTARA	741.000.000	741.000.000

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/NAMA UNIT/PROVINSI/SATKER	PAGU DIPA (PNBP)	MP1
1	2	3	4	5	6	7
124	157	Raha	205302	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUNA BARAT	543.000.000	543.000.000
125	060	Kendari	201306	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONSEWA KEPULAUAN	741.000.000	741.000.000
126	103	Bau-Bau	205401	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON SELATAN	741.000.000	741.000.000
127	156	Kolaka	201201	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KOLAKA TIMUR	913.500.000	913.500.000
				<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>1.827.000.000</b>	
128	038	Mataram	239243	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB LOMBOK BARAT	1.086.000.000	1.086.000.000
129	169	Selong	239087	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB LOMBOK TIMUR	741.000.000	741.000.000
				<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>4.494.000.000</b>	
130	059	Majene	340541	DINAS TENAGA KERJA KAB MAMASA	1.185.000.000	1.185.000.000
131	059	Majene	340117	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE	840.000.000	840.000.000
132	178	Mamuju	340600	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAMUJU TENGAH	642.000.000	642.000.000
133	178	Mamuju	340317	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MAMUJU UTARA	642.000.000	642.000.000
134	178	Mamuju	340215	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MAMUJU	1.185.000.000	1.185.000.000
				<b>GORONTALO</b>	<b>2.542.500.000</b>	
135	180	Marisa	319064	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BOALEMO	642.000.000	642.000.000
136	050	Gorontalo	319062	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA GORONTALO	1.357.500.000	1.357.500.000
137	050	Gorontalo	310717	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GORONTALO UTARA	543.000.000	543.000.000
				<b>BALI</b>	<b>840.000.000</b>	
138	154	Amlapura	229187	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KLUNGKUNG	840.000.000	840.000.000
				<b>MALUKU</b>	<b>1.607.000.000</b>	
139	173	Masohi	219065	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MALUKU TENGAH	99.000.000	99.000.000
140	104	Saumlaki	219189	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, NAKERTRANS KAB MALUKU TENGGARA BARAT	99.000.000	99.000.000
141	084	Tual	219185	DINAS TENAGA KERJA KAB MALUKU TENGGARA	198.000.000	198.000.000
142	061	Ambon	219070	DINAS NAKERTRANS KAB PULAU BURU	1.112.000.000	1.112.000.000
143	084	Tual	219234	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN CATATAN SIPIL KOTA TUAL	99.000.000	99.000.000
				<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>2.738.000.000</b>	
144	172	Atambua	249102	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BELLU	99.000.000	99.000.000
145	039	Kupang	249304	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KAB KUPANG	99.000.000	99.000.000
146	039	Kupang	240457	DINAS TENAGA KERJA KAB TIMUR TENGAH SELATAN	99.000.000	99.000.000
147	111	Ruteng	249396	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB MANGGARAI BARAT	1.291.000.000	1.291.000.000

NO	KODE KPPN	KPPN PEMBAYAR	KODE SATKER	KODE/ NAMA UNIT/ PROVINSI/ SATKER			PAGU DIPA (PNBP)	MP I
				5	6	7		
1	2	3	4	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SIKKA				
148	040	Ende	249110	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALAKA			99.000.000	99.000.000
149	172	Atambua	242210	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ALOR			99.000.000	99.000.000
150	039	Kupang	249108	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TIMOR TENGAH UTARA			99.000.000	99.000.000
151	172	Atambua	249320	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NAGEKEO			99.000.000	99.000.000
152	040	Ende	241710	PAPUA			754.000.000	754.000.000
							834.000.000	834.000.000
153	063	Jayapura	259265	DINAS TENAGA KERJA KOTA JAYAPURA			834.000.000	834.000.000
				MALUKU UTARA			6.832.000.000	6.832.000.000
154	112	Tobelo	289081	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB HALMAHERA TIMUR			1.291.000.000	1.291.000.000
155	112	Tobelo	289086	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PULAU MOROTAI			914.000.000	914.000.000
156	062	Ternate	289079	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB HALMAHERA SELATAN			1.291.000.000	1.291.000.000
157	062	Ternate	289075	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH			1.112.000.000	1.112.000.000
158	062	Ternate	289084	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB HALMAHERA BARAT			1.112.000.000	1.112.000.000
159	062	Ternate	289090	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN			1.112.000.000	1.112.000.000
				PAPUA BARAT			556.000.000	556.000.000
160	066	Sorong	339184	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SORONG			556.000.000	556.000.000



A.N. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTUR PELAKSANAAN JANGGARAN

DIDYK CHOIROEL  
NIP. 197104161992011001